

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah diharapkan dapat menghasilkan sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan daerah diwujudkan dalam suatu program dan kegiatan yang lebih dikenal sebagai proyek pemerintah. Proyek-proyek ini meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat, mencakup penyediaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, pengairan, telekomunikasi, transportasi, listrik dan air minum. Pelaksanaan suatu proyek, tentu tidak terlepas dari suatu proses pengadaan barang/jasa dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengadaan tersebut. Pengadaan barang/jasa pemerintah sesungguhnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, Pengadaan barang/jasa Konstruksi (meliputi Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi) dan Pengadaan Barang/jasa non Konstruksi.¹

Pemerintah pusat mengatur tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut adalah Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa

¹ Budiman Arpan. 2003. *SBU Tidak Dipersyaratkan Dalam Pelelangan*. Pontianak post./index.asp. Hal 2

Pemerintah. Sesuai dengan Pasal 1 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tersebut, pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN / APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Pengadaan tersebut sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), baik untuk jasa konstruksi maupun non konstruksi. Dengan kata lain Keppres ini tidak hanya mengatur pengadaan barang/jasa konstruksi, tetapi juga mengatur pengadaan barang/jasa selain konstruksi. Dengan diberlakukannya Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah diharapkan agar proses pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel.²

Proses pengadaan barang pemerintah daerah harus mengikuti pelelangan umum yaitu metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat.³ Perusahaan penyedia barang/jasa yang mengikuti lelang dalam pengadaan barang/jasa pada pemerintah daerah selain harus memenuhi syarat-syarat administrasi juga harus memberikan surat jaminan penawaran yang diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*Surety*

² Ibid. Hal 2.

³ Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 1 Ayat 23

Bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.⁴

Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa. Jaminan ini diberlakukan agar perusahaan penyedia barang/jasa yang memenangkan proyek pengadaan barang/jasa tidak melakukan wanprestasi atas kesepakatan perjanjian yang telah disepakati.

Ada berbagai macam asuransi dan penjaminan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap pihak-pihak terkait apabila terjadi wanprestasi dari kesepakatan perjanjian yang sudah disepakati. Asuransi atau dalam bahasa Belanda "*verzekering*" berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu: yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.⁵

Surety Bond semula hanya diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi tertentu saja, yaitu PT. Jasa Raharja, akan tetapi saat ini sudah lebih meluas, sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor

⁴ Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Ayat 1 Pasal 5c

⁵ Wirjono prodjodikoro. 1986. *Hukum asuransi Indonesia*. Jakarta : PT Intermasa. hal. 1

761/KMK.013/1992 tentang Bank-Bank yang dapat menerbitkan Surat Jaminan Bank (Bank Garansi) dan Lembaga Keuangan Non Bank (Perusahaan Asuransi) yang dapat menerbitkan *Surety Bond*. Kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 951/KMK.01/1993 menunjuk 14 Perusahaan Asuransi yang dapat menerbitkan *Surety Bond*, salah satunya adalah PT. Asuransi Kredit Indonesia.

PT. Asuransi Kredit Indonesia yang disingkat Askrindo merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha asuransi. PT Askrindo didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 6 april 1971 melalui peraturan pemerintah no. 1/1971 tanggal 11 januari 1971 yang telah berupaya menumbuh kembangkan usaha micro, kecil dan menengah (UMKM). Pada awalnya askrindo menjalankan usaha asuransi kredit bank dan dalam perkembangan selanjutnya upaya tersebut di lengkapi dengan usaha-usaha lainnya, khususnya di bidang penjaminan yang salah satunya adalah *Surety Bond*.

Surety Bond atau juga yang disebut jaminan tender ini merupakan salah satu bentuk alternatif yang dikeluarkan dari perusahaan asuransi untuk menjamin pemilik proyek (*obligee*) supaya hak-haknya terlaksana dengan baik dan benar. Seperti yang di kemukakan oleh Ricardo Simanjuntak di artikelnya yang berjudul "*Surety Bond dan kepastian hukum penjaminan di Indonesia*", *Surety Bond* merupakan suatu produk inovatif perusahaan asuransi sebagai upaya pengambilalihan potensi resiko kerugian yang mungkin dapat dialami

oleh salah satu pihak atas kepercayaan yang diberikannya pada pihak lain dalam pelaksanaan kontrak yang telah disepakati oleh mereka.⁶

Surety Bond adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak yaitu *Surety* dan *Principal*, yang dimana pihak pertama (*Surety*) memberikan jaminan kepada pihak kedua (*Principal*) bagi kepentingan pihak ketiga (*Obligee*) bahwa apabila *Principal* gagal atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *Obligee*, maka *Surety* akan bertanggung jawab terhadap *Obligee* untuk menyelesaikan kewajiban *Principal* tersebut dengan kesepakatan yang sudah dijamin.

Surety Bond sebagai alternatif lain dari Bank Garansi dimaksudkan oleh Pemerintah untuk:⁷

1. Membantu para pengusaha dalam penyediaan jaminan, oleh karena dengan menggunakan *Surety Bond* ini, maka para pengusaha mempunyai beberapa alternatif yang dapat dipilihnya dan memberikan keuntungan.
2. Untuk menciptakan pasar yang kompetitif, sehingga pemberian jaminan dapat diberikan oleh pihak perbankan dan pihak Asuransi. Dengan persaingan ini, maka diharapkan setiap penjamin dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, baik *Principal* maupun *Obligee*.
3. Untuk memberikan kesempatan berusaha bagi para pengusaha yang mempunyai kemampuan teknis yang baik, tetapi kurang didukung oleh

⁶ Ricardo Simanjuntak. 2004. *Surety Bond Dan Kepastian Hukum Penjaminan di Indonesia*, Artikel LPHI Jakarta. 2004. Hal 2

⁷ Atty Hermiati. 1992. *Surety Bond dan Prinsip-prinsip Underwriting*, PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta. Hal 4

kemampuan keuangannya, karena biaya untuk memperoleh *Surety Bond* relatif lebih murah dari pada Bank Garansi.

4. Dengan penggunaan *Surety Bond* diharapkan dapat membangkitkan sikap “*Insurance Minded*” di kalangan masyarakat.

Surety Bond sendiri diperkenalkan di Indonesia sejak di terbitkannya kepres nomor 14 tahun 1980 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/D) dan Bantuan Luar Negeri. Setelah putusan itu di keluarkan, diterbitkan juga Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/KMK.011/1980 tentang Penunjukan Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank Yang Dapat Menerbitkan Jaminan.

Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 yang telah diperbaharui dan peraturan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang peraturan ini adalah perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kebijakan pemerintah tersebut bertujuan untuk membantu pengusaha ekonomi lemah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam proyek yang didanai oleh APBN / APBD serta bantuan luar negeri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan pemberian ijin kepada Lembaga Keuangan Non Bank untuk menerbitkan jaminan dalam bentuk *Surety Bond* sebagai alternatif pengganti bank garansi yang diterbitkan oleh bank.

Penerbitan *Surety Bond* akan dikenakan biaya yaitu *service charge*, yaitu biaya pelayanan dan tujuannya melindungi pemilik proyek (*obligee*)

sehingga apabila kontraktor gagal melaksanakan tugasnya maka *surety company* memberikan jaminan. Manfaat adanya *Surety Bond* serta apakah perusahaan asuransi yang menjamin *bonafid*, baru diketahui pada saat terjadinya klaim.⁸

Jaminan hanya ada apabila kegagalan tersebut terjadi akibat kesalahan dari kontraktor melaksanakan tugasnya sesuai isi kontrak kerja. Jika tidak dapat dipenuhi isi kontrak adalah sebagai akibat dari kesalahan *obligee*, maka *surety company* tidak wajib mencairkan jaminannya.⁹ Sehubungan dengan pembayaran klaim kepada *obligee*, maka *surety company* berhak untuk menuntut pembayaran ganti rugi tersebut kepada principal atau yang lazim dikenal dengan nama *recovery*. Pada saat terjadinya klaim inilah akan diketahui apakah waktu memberikan jaminan para underwiter sudah menganalisa faktor-faktor yang perlu dipersyaratkan dalam perjanjian dengan *obligee*.

Prosedur penanganan klaim ini tergantung apakah jaminan tersebut didasarkan atas dasar *unconditional* ataupun *conditional*. Jika didasarkan atas prinsip *unconditional*, maka penyelesaian klaimnya berpegang pada prinsip ganti rugi. Jika jaminannya bersifat *unconditional*, maka berlaku prinsip “*penalty*” yaitu apabila principal gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang disepakati, maka penjamin dalam hal ini *surety* wajib membayar sebesar jaminan.

⁸ J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, *Surety Bond Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi*, (Jakarta : CV. Dhamaputra, 2003. hal. 82.

⁹ *Ibid.* Hal. 93

Sebelum membuat *Surety Bond*, maka *principal* dipersyaratkan membuat *Agreement Of Indemnity* (Perjanjian Ganti Rugi) yang akan digunakan sebagai dasar untuk penuntutan ganti kerugian terkait dengan klaim yang telah dibayarkan oleh *surety*. Pada prakteknya meskipun perusahaan asuransi telah memiliki *Agreement Of Indemnity* untuk melakukan penuntutan ganti rugi, hal itu sulit untuk dilakukan.

Penulis bermaksud membahas permasalahan tentang jaminan pelaksanaan atau *performance bond* yang dimana pelaksanaannya itu sendiri banyak masyarakat atau perusahaan yang terkait kurang mengetahui apa itu *Surety Bond* dan bagaimana pelaksanaannya. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa mempermudah dan membantu masyarakat dan para pengusaha untuk lebih memahami atau mengetahui apa itu *Surety Bond* dalam pelaksanaannya beserta penjaminannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penerbitan *Surety Bond* di PT. Askrindo pada proyek pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surakarta?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan *Surety Bond* di PT Askrindo pada proyek pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penerbitan *Surety Bond* di PT. Askrimo pada proyek pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surakarta
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan *Surety Bond* di PT Askrimo pada proyek pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis mengadakan penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teori maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

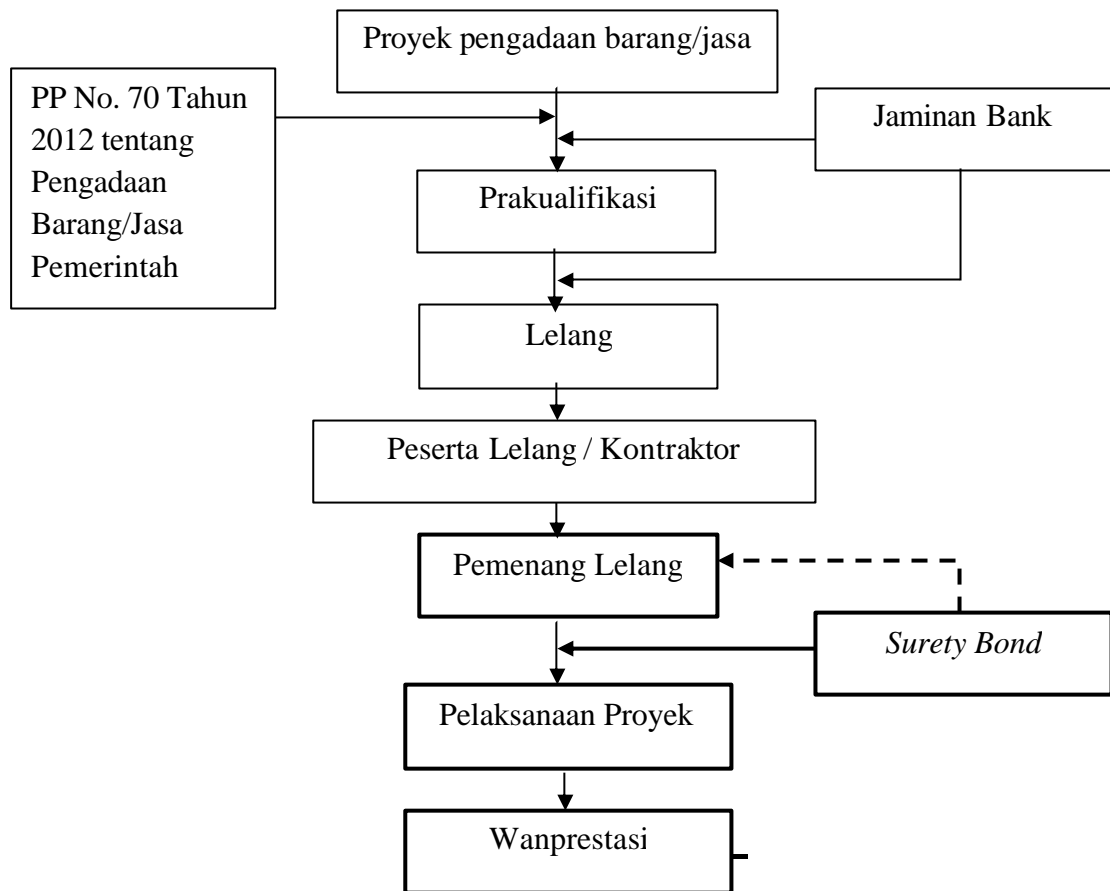
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan terhadap teori yang ada kaitannya dengan pelaksanaan penjaminan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan gambaran dalam Pelaksanaan *Surety Bond* Pada PT. Askrimo sehingga dapat berguna bagi masyarakat dalam penerapan di lapangan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengadaan barang/jasa diartikan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang atau jasa dalam batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Proses pengadaan akan terjadi di semua tahapan proyek konstruksi. Pengadaan barang tersebut dapat dibagi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, atau yang lazim disebut proses pemborongan bangunan. Adapun peserta dalam proses tersebut yaitu: Pemilik atau pemberi kerja, Pelaksana atau kontraktor utama, serta para sub kontraktor, Perancang atau perencana, serta Pengawas atau direksi.¹¹

¹⁰ Mohamad Ichram Mukmin. 1992. *Pengadaan Barang dan Jasa*. Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran. Hal 2

¹¹ F.X.Djumialdji. 1995. *Perjanjian Pemborongan*. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 7-8

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.¹² Jaminan dalam perjanjian pemborongan adalah salah satu persyaratan yang diminta oleh pemimpin proyek terhadap rekanan dengan maksud agar proyek yang dilaksanakan dapat berjalan lancar.¹³

1. Bank Garansi / Jaminan Bank, yaitu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini tidak memenuhinya
2. *Surety Bond* (dibahas tersendiri), adalah suatu perikatan jaminan dalam bentuk warkat di mana penjamin (perusahaan *surety*) dengan menerima premi (*service charge*) mengikatkan diri guna kepentingan *oblige* untuk menjamin pelaksanaan atas suatu kewajiban atau perikatan pokok dari prinsipal, yang mengakibatkan kewajiban membayar atau memenuhi suatu prestasi tertentu terhadap *oblige*, apabila prinsipal cedera janji atau wanprestasi, untuk pemenuhan kewajibannya kepada pemberi pekerjaan¹⁴
3. Jaminan Pemeliharaan, pemeliharaan adalah selama jangka waktu tertentu,
4. Jaminan Pembangunan, pihak yang memborongkan bangunan mensyaratkan adanya pemborong peserta yang sanggup bertindak sebagai penanggung untuk menyelesaikan kewajiban pembangunan tersebut.

¹² Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 22

¹³ Ibid. Hal. 29

¹⁴ Ibid. Hal 42

Adapun jenis-jenis *Surety Bond* adalah:¹⁵

- a. *Bid Bond* (Jaminan Pelaksanaan)
- b. *Performance Bond* (penyelesaian pekerjaan)
- c. *Advance Payment Bond* (Jaminan Uang Muka).
- d. *Maintenance Bond* (Jaminan Pemeliharaan)
- e. *Payment Bond* (principal mampu membayar semua upah buruh dan harga bahan bangunan sesuai dengan isi perjanjian atau kontrak sampai pada jumlah maksimum yang diperjanjikan.

Wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁶ Wujud dari wanprestasi antara lain:¹⁷ debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, dan debitur terlambat berprestasi. Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan atau kemestian bagi debitur membayar ganti rugi. Atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. metodologis berarti menggunakan metode-

¹⁵ Emmy Panggaribuan. 1996. Bentuk Jaminan (*Surety-Bond*, *Fidelity Bond*) Dan *Pertanggungjawaban Kejahatan (crime Insurance)*, Liberty, Yogyakarta. Hal. 53

¹⁶ Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa. Hal. 110

¹⁷ J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan –Perikatan pada Umumnya*. Bandung : Alumni. Hal. 122-130

¹⁸ M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. 60

metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis adalah sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya ilmiah.¹⁹

Penelitian hukum merupakan salah satu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁰ Metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris adalah yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.²¹ Penelitian ini menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke lapangan ke dalam masyarakat untuk mengumpulkan data yang objektif.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Deskriptif analitis karena hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara

¹⁹ Sutrisno Hadi. 1990. *Metodologi Research I*. Yogyakarta : UGM. Hal.4

²⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta hal. 3

²¹ Soejono Soekanto. 1999. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Hal. 12.

rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perjanjian *surety bond*.²²

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di kantor perwakilan PT Askrindo Kota Surakarta.

4. Sumber data

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Kantor PT Askrindo Kota Surakarta. Peneliti mengambil sampel penelitian dengan menggali sumber informasi tersebut kepada:

- 1) Kepala Cabang/Pimpinan PT. Askrindo di Kota Surakarta
- 2) Staf karyawan di PT. Askrindo di Kota Surakarta
- 3) Nasabah/perusahaan penyedia barang/jasa di Kota Surakarta

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode pengumpulan data

²² Ibid..Hal. 13.

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Study Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepastakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Study Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa berbagai data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian²³ Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan dari penerbitan *surety bond* hingga penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.

²³ Ibid. hal 67

6. Metode analisis data

Setelah data terkumpul, tahap yang dilakukan selanjutnya adalah analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian tersebut.

Teknik analisis data ada 2 macam, yaitu:

- a.) Analisis data kualitatif
- b.) Analisis data kuantitatif

Berdasarkan dua teknik analisis data tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang memadukan data berupa hasil pengamatan, wawancara, bahan tertulis berupa Undang-undang, dokumen, buku-buku, dan lain-lain yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti untuk mencari pemecahan masalah dan menarik kesimpulannya, maka diharapkan dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan permasalahan yang diteliti.

Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.²⁴ Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Reduksi data sudah berlangsung sejak

²⁴ Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito. Hal. 179

peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian.

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis berdasarkan pemahaman tersebut. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data.

G. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN menguraikan Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA menguraikan tentang Tinjauan umum tentang pengadaan barang/jasa: Pengertian Barang dan Jasa, Tinjauan tentang Pengadaan Barang / Jasa. Tinjauan umum tentang jaminan: Pengertian Jaminan, Jenis Jaminan, Sifat Perjanjian Jaminan, Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan. Tinjauan tentang *Surety Bond*: Pengertian *Surety Bond*,

Perbedaan *Surety Bond* dengan Bank Garansi, *Surety Bond* dengan Asuransi, Jenis-jenis *Surety Bond*, Persyaratan dalam *Surety Bond*, Wanprestasi dalam *Surety Bond*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menguraikan tentang Proses Penerbitan *Surety Bond* di PT. Askrimdo pada proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kota Surakarta; Akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan *Surety Bond* di PT Askrimdo pada proyek pengadaan barang di Pemerintah Surakarta.

BAB IV: PENUTUP berisi Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang diberikan.